

## **PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS DESA TANJUNG ANOM**

**Indah Doanita Hasibuan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Farah Sabila<sup>2 (CA)</sup>**

Email: sabilafarah2@gmail.com (*Corresponding Author*)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Tiara Pakar Ningrum<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Naswa Fadila<sup>4</sup>**

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Wulan Andika<sup>5</sup>**

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola dan dimanfaatkan oleh puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Puskesmas adalah organisasi nirlaba atau nirlaba BPJS Kesehatan memberikan insentif JKN, yang dikenal sebagai kapitasi JKN, kepada Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan. Dana Insentif JKN dibayar setiap bulan tanpa memperhitungkan berapa banyak Pasien Peserta JKN yang berobat atau jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka. Artinya, Puskesmas menerima bantuan tunai dari JKN setiap bulan. Puskesmas Tanjung Anom adalah salah satu Puskesmas yang ada di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer digunakan, yang berarti data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi langsung dan teknik penunjang adalah wawancara dengan informan yaitu kepala puskesmas, bendahara jaminan kesehatan nasional dan tata usaha puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan dana kapitasi JKN di PuskesmasTanjung Anom. Setelah dilakukan penelitian, kami menemukan bahwa elemen perencanaan sudah optimal. Artinya, perencanaan sesuai dengan anggaran yang ada dan memenuhi usulan kebutuhan puskesmas

**Kata Kunci:** Dana Kapitasi, JKN, Pengelolaan, Puskesmas

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, dan setiap negara menyadari bahwa Kesehatan adalah aset terbesar untuk kemakmuran, sehingga kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (Ambulan Panjaitan, 2020).

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan utama dan pusat pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di bawah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kualitas pelayanan yang diberikan di puskesmas memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kesehatan secara keseluruhan. Puskesmas adalah organisasi nirlaba atau nirlaba. BPJS Kesehatan memberikan insentif JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), yang dikenal sebagai kapitasi JKN, kepada Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan. Dana Insentif JKN dibayar setiap bulan tanpa memperhitungkan berapa banyak Pasien Peserta JKN yang berobat atau jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka. Artinya, Puskesmas menerima bantuan tunai dari JKN setiap bulan, yang merupakan hak operasional Puskesmas (Anggraini, 2023). Pengelolaan Dana Kapitasi JKN menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Puskesmas Tanjung Anom yang berada di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang merupakan puskesmas pembantu yang tidak berbatasan dengan laut dan diluar Kawasan hutan. Terdapat 2,471 keluarga, ada kepala desa, ada sekretaris desa dan 11 aparatur pemerintahan, ada BPD/ Lembaga masyarakat dengan jumlah 11 orang. Musyawarah Pada tahun 2017 sebanyak tanjong anom tergolong maju menurut indeks desa membangun dan tergolong mandiri (Kementerian Keuangan, 2019).

Beberapa fungsi memengaruhi sistem keuangan kesehatan, termasuk pengendalian dan pengawasan pemerintah dan pemimpin, sumber daya fisik dan manusia, pelayanan kesehatan, dan keuangan. Fungsi sistem pembiayaan kesehatan secara khusus mencakup pengumpulan pendapatan, konsolidasi anggaran, dan pengeluaran anggaran, dan secara langsung meningkatkan kinerja berdasarkan kebutuhan, efisiensi, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan data dan informasi diatas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan Nasional di puskesmas Desa Tanjung Anom Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer digunakan, yang berarti data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi langsung dan teknik penunjang adalah wawancara dengan informan yaitu kepala puskesmas, bendahara jaminan kesehatan nasional dan tata usaha puskesmas.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Desa Tanjung Anom. Metode analisa yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menalarkan variable-variabel yang diteliti secara naratif berupa informasi.

## **HASIL**

### **Pengelolaan Dana Kapitasi**

1. **Proses Pelaporan Pencarian Dan Pertanggung Jawaban Dana Kapitasi**  
Melibatkan serangkaian langkah dalam mengumpulkan, merekam, dan menyampaikan informasi terkait penggunaan dana kapitasi secara transparan.

“...Proses pencarian dana kapitasi puskesmas tanjung anom ini pencariannya melalui puskesmas gunung tinggi, mereka hanya membuat rekapan lalu mereka laporan ke puskesmas gunung tinggi dan disana ada bendahara lalu laporan ke khusus JKN melalui staf-staf yang sudah ditentukan. Puskesmas ini hanya melayani lalu membuat pelaporan yang sudah ditetapkan itu perharinya.” (Kepala Puskesmas)

Kepala Puskesmas menjelaskan proses pencarian dana kapitasi di Puskesmas Tanjung Anom melibatkan kerja sama dengan Puskesmas Gunung Tinggi. Puskesmas Tanjung Anom membuat rekapan pengeluaran yang terkait dengan dana kapitasi, kemudian melaporkannya ke Puskesmas Gunung Tinggi. Di Puskesmas Gunung Tinggi, bendahara bertanggung jawab dalam menyusun laporan yang kemudian disampaikan ke kantor JKN melalui staf yang telah ditunjuk.

2. **Akumulasi Dan Perencanaan Dana Kapitasi**

Perencanaan akan ditetapkan untuk mengalokasikan Dana Kapitasi ke berbagai program, layanan kesehatan, dan kegiatan promosi dan pencegahan. Rencana ini akan mencakup alokasi insentif untuk obat-obatan, biaya rumah sakit, layanan kesehatan dasar, vaksinasi, dan program kesehatan lainnya. “...Sekarang sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) obat sudah dibeli menggunakan biaya per-puskesmas, tidak lagi ditanggung dengan pemerintah, obat JKN tetap sama namun perhitungannya berbeda-beda, setiap tahun bertambah pesertanya tidak bisa dipastikan sekian tahun karena pasti berbeda- beda, namun setiap bulan juga ada perubahan.” (Kepala Puskesmas)

Perencanaan dana kapitasi menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks pengadaan obat untuk layanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa meskipun angka kapitasi kumulatif dihitung setiap tahun, namun perencanaan pengadaan obat oleh JKN dilakukan sepanjang tahun dan dilakukan perubahan setiap bulannya.

3. **Keterlibatan Dana JKN dan APBD dalam Perencanaan dan Pelaksanaan**

Untuk menjamin akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi masyarakat, perencanaan dan implementasi sistem kesehatan sangat penting. “...Dari perencanaan untuk biaya obatnya dan perhitungannya dua-duanya ada, ada dari JKN ada dari APBD, karena dua-duanya seimbang dalam perencanaan untuk pembiayaan.” (Kepala Puskesmas)

Kepala Puskesmas menekankan bahwa perencanaan biaya, seperti biaya obat-obatan dan administrasi, dipengaruhi oleh kedua dana JKN dan APBD. Puskesmas Tanjung Anom memastikan bahwa rencana pendanaan dilaksanakan secara seimbang antara dana JKN dan APBD, sehingga tercipta sinergi antara anggaran pemerintah daerah dan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

#### Pemanfaatan Dana Kapitasi Untuk Operasional Puskesmas

Dalam wawancara dengan bendahara dan tata usaha Puskesmas, didapat informasi terkait dana kapitasi digunakan dan di rencanakan untuk kebutuhan operasional Puskesmas.

##### 1. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Perencanaannya

Pengelolaan Dana Kapitasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan di masyarakat yang dilindungi oleh program asuransi kesehatan jika direncanakan dengan baik dan digunakan dengan benar. Selama implementasi, pengelolaan Dana Kapitasi harus dipantau dan dinilai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar, hasil yang diharapkan dicapai, dan standar kualitas dipatuhi.

“...Pemanfaatan dana dan perencanaan ini bisa di alokasikan ini yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduknya.” (Bendahara Puskesmas)

Bendahara Puskesmas menjelaskan bahwa persentase tetap dari anggaran Dana Desa digunakan untuk mengatur penggunaan dan penganggaran penghargaan. Dana desa kemudian didistribusikan secara merata ke setiap desa berdasarkan demografi penduduknya. Metode ini memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang sama terhadap sumber daya kesehatan dan menekankan bahwa insentif didistribusikan secara adil.

##### 2. Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Biaya Operasional Puskesmas

Proses penting ini memungkinkan fasilitas layanan kesehatan primer bekerja dengan efisien dan memberikan layanan berkualitas kepada masyarakatnya.

“...Pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya operasional puskesmas biasanya untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan dan setiap bulannya dibuat perencanaan tersebut.”(Tata Usaha Puskesmas)

Tata Usaha Puskesmas menjelaskan untuk mendukung biaya operasional pelayanan medis dan fasilitas kesehatan, penggunaan penghargaan biaya operasional Puskesmas dilakukan melalui pelaksanaan rencana belanja insentif setiap bulan. Ini memungkinkan Puskesmas untuk menilai kebutuhan operasional secara berkala dan melakukan perubahan yang diperlukan.

##### 3. Persentase Dana Kapitasi untuk Pembelian Obat-obatan

Persentase dana kapitasi yang dialokasikan untuk pembelian obat dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan prioritas pengelola program jaminan kesehatan serta kebutuhan kesehatan masyarakat yang dilayani.

“...Total anggaran JKN 40% untuk pegawai, sedangkan 60% untuk operasional (obat-obatan dan alat yang dibutuhkan puskesmas).” (Tata Usaha Puskesmas). Pihak Puskesmas mengatakan bahwa 40% dari anggaran JKN akan dialokasikan untuk pegawai dan 60% sisanya akan dialokasikan untuk operasional, termasuk membeli obat-obatan dan peralatan yang dibutuhkan Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar uang penghargaan dialokasikan untuk pembelian obat-obatan, yang merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa obat-obatan tersedia dan dapat diakses di masyarakat yang dilayani oleh Puskesmas.

### **Strategi Mekanisme Dalam Dana Kapitasi**

#### **1) Proses Penerimaan Dana Kapitasi**

Untuk menerima dana kapitasi serta memantau dan mengevaluasi kinerja program, beberapa langkah penting harus dilakukan. Ini termasuk memantau kepatuhan penyedia layanan, menilai efisiensi proses penagihan, dan memberikan layanan yang baik kepada peserta.

“...Dana kapitasi ini proses nya melalui kepengurusan JKN lalu masuk ke rekening masing-masing.” (Bendahara Puskesmas) Pencairan dana kapitasi berkaitan erat dengan penyediaan layanan kesehatan nasional. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh perwakilan keuangan, uang muka akan dikirim langsung ke rekening Puskesmas dan biasanya akan dibayarkan sebelum tanggal tertentu setiap bulan.

#### **2) Pengalokasian Dana Kapitasi untuk Pembiayaan Obat**

Mengutamakan penggunaan kapitasi untuk pembelian obat. Prioritas ini ditetapkan berdasarkan tingkat keparahan penyakit, kebutuhan obat-obatan kritis, dan ketersediaan obat alternatif yang lebih murah. Ini melibatkan pembagian dana untuk pembelian obat sesuai dengan prioritas ini.

“...Tidak ada, karena pemerintah tidak ada memberikan dana dari mana pun kecuali dari JKN.” (Tata Usaha Puskesmas) Tata Usaha Puskesmas menegaskan tidak ada dana selain JKN yang digunakan untuk membiayai obat-obatan, yang menunjukkan bahwa Puskesmas sangat bergantung pada insentif JKN untuk mendanai kebutuhan obat-obatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Metode ini menghindari ambiguitas dan kemungkinan penyalahgunaan dana dengan memastikan bahwa dana imbalan digunakan dengan jelas.

### **Monitoring Evaluasi Dana Kapitasi**

#### **1) Karakteristik Dana Kapitasi dalam Monitoring dan Evaluasi**

Sistem pembayaran di mana penyedia layanan kesehatan menerima pembayaran tetap per orang (atau per kapitasi) untuk menyediakan seluruh rangkaian layanan kesehatan kepada sekelompok peserta selama periode waktu

tertentu, misalnya per bulan. "...Berbeda, karena setiap bulan itu ada perubahan apalagi pertahunnya jadi tidak sama setiap bulannya dan setiap bulan pasiennya berbeda-beda. Jika setiap bulannya sama pasti sudah tau berapa dana yang diperoleh, lagi pula JKN nya naik turun." (Bendahara Puskesmas)

Bendahara Puskesmas menjelaskan biaya dana kapitasi tidak tetap dan berubah setiap bulan karena perubahan yang terjadi setiap bulan, seperti jumlah pasien yang pergi ke Puskesmas. Oleh karena itu, rencana penggunaan dana kapitasi harus dibuat secara berkala dan mempertimbangkan kondisi saat ini.

## 2) Waktu Pembuatan Perencanaan dan Durasi Pelaksanaanya

Perencanaan dana kapitasi JKN biasanya dilakukan setiap tahun atau beberapa tahun sekali, tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ini dapat dimulai beberapa bulan sebelum tahun fiskal untuk memberikan waktu yang cukup untuk proses yang komprehensif.

"...Dibuatnya perencanaan ini sebelum melaksanakan suatu program atau pekerjaan dan perencanaan ini dibuat sebulan sekali." (Kepala Puskesmas). Kepala Puskesmas menjelaskan sebelum program atau pekerjaan dilakukan, perlu direncanakan bagaimana dana penghargaan akan digunakan. Pusat kesehatan masyarakat dapat menilai kebutuhan operasional secara berkala dan melakukan penyesuaian dengan memiliki rencana bulanan. Periode perencanaan didasarkan pada periode bulanan sehingga puskesmas dapat beradaptasi dengan perubahan dan permintaan baru.

## **Kendala Hambatan**

Selama proses dana kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), banyak tantangan dan tantangan yang dapat memengaruhi efisiensi dan efisiensi pelaksanaan program tersebut. "...Hambatan dalam menggunakan dana kapitasi JKN di puskesmas tanjung anom ini tidak memiliki hambatan, berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang dilayani di puskesmas ini." (Kepala Puskesmas) Dalam wawancara dengan Kepala Puskesmas, terungkap bahwa tidak ada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas Tanjung Anom. Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah masalah atau hambatan akan muncul di masa depan, dan kemudian membuat cara yang efektif untuk mengatasi mereka.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Dana Kapitasi**

Karena pentingnya kesehatan untuk setiap orang, pemerintah memprioritaskan layanan medis melalui program seperti jaminan kesehatan sosial dan jaminan kesehatan nasional (JKN). (Fitria Handayani, 2019). Sangat penting untuk menjalankan sistem kesehatan, terutama pada tingkat layanan utama seperti puskesmas, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia membangun sistem modal untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat.

Fakta bahwa koordinasi antar puskesmas memiliki peran penting menyoroti kompleksitas administratif dalam mengelola dana tersebut. Kerja sama antar dinas kesehatan menjadi krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan insentif. Selain itu, pengelolaan Rencana Kefarmasian JKN telah

mengalami perubahan akibat transfer tanggung jawab pembelian obat kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pembiayaan kesehatan masyarakat di mana puskesmas setempat sekarang memiliki kewenangan dalam mengatur penggunaan kapitasi sesuai kebutuhan daerah. Dikarenakan peran dana JKN dan APBD dalam pembiayaan layanan kesehatan, integrasi kebijakan antara tingkat nasional dan daerah menjadi sangat penting. Hal ini akan membentuk dasar yang kokoh untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan primer di tingkat daerah. Pengelolaan insentif di Puskesmas Tanjung Anom menunjukkan tantangan dan peluang dalam menerapkan sistem kesehatan universal. Hasil wawancara ini memiliki implikasi yang luas:

- a) Keterlibatan Masyarakat: Transparansi dalam pengelolaan kepala puskesmas memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi bagaimana program jaminan kesehatan nasional dijalankan
- b) Peningkatan Efisiensi: Puskesmas akan lebih mampu memenuhi kebutuhan daerah dengan lebih fleksibel dengan mengalihkan tanggung jawab pembelian obat ke BLUD. Ini juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana insentif.
- c) Sinergi Antar Program: Dengan menggabungkan Dana JKN dan APBD, ada peluang untuk meningkatkan koordinasi program kesehatan yang didukung pemerintah pusat dan daerah.
- d) Penguatan Kapasitas Manajerial: Keterampilan manajemen yang kuat ditingkat puskesmas diperlukan untuk mengelola dana kapitasi, termasuk perencanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan.

### **Pemanfaatan Dana Kapitasi Untuk Operasional Puskesmas**

Puskesmas memainkan peran krusial dalam memberikan layanan kesehatan primer kepada masyarakat, dengan penggunaan dana insentif menjadi fokus utama dalam operasional mereka. Untuk membiayai layanan kesehatan dan menopang biaya operasional pelayanan medis, manfaat kapitasi JKN secara keseluruhan dimanfaatkan. Dana untuk mendukung biaya operasional ditentukan oleh selisih antara jumlah kapitasi dan alokasi yang dialokasikan untuk pembayaran pengobatan. Penetapan alokasi dana kapitasi yang diterima oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dilakukan setiap tahun melalui keputusan Kepala Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Naufal Hidayat, 2021).

Pengeluaran untuk barang operasional di Puskesmas mengikuti mekanisme perencanaan yang melibatkan usulan dari setiap unit kerja Puskesmas, yang kemudian dilaporkan kepada pengelola belanja operasional, yaitu Kepala Tata Usaha dan Bendahara JKN Puskesmas (Dedy & Hardy, 2021).

Pendekatan perencanaan yang berkelanjutan ini memungkinkan Puskesmas untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pengenalan kapitasi ke dalam proyek Puskesmas diharapkan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, dan menjamin keberlanjutan operasional Puskesmas. Namun, tantangan seperti pengelolaan insentif yang efektif dan transparan, pengawasan ketat terhadap penggunaan dana, serta kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan juga harus diatasi.

### **Strategi Mekanisme Dalam Dana Kapitasi**

Puskesmas merupakan salah satu layanan kesehatan yang tersedia bagi peserta JKN. Sistem pembayaran BPJS Kesehatan untuk puskesmas didasarkan pada uang muka, di mana biaya kapitasi merupakan pembayaran bulanan yang dibayarkan terlebih dahulu kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tanpa memandang jenis atau cakupan layanan kesehatan yang diberikan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2022, dana kapitasi JKN digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 60%, dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan (Dedy & Hardy, 2021).

Saat mengelola dana kapitasi di puskesmas, penting untuk memahami metode dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan transparan. Melalui wawancara dengan pengelola dan bendahara puskesmas, kami berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana insentif diprioritaskan dan dikelola. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan dana bernama Insentif JKN kepada institusi kesehatan tingkat pertama yang memberikan layanan medis kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Batasan tersebut disebabkan oleh manajemen dan pengembangan iuran peserta Dana Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Batas maksimal Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah batas tersebut. Untuk memastikan bahwa tunjangan kapitasi digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, puskesmas dapat menerima tunjangan kapitasi setiap bulannya, sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan yang mengatur pembayaran modal dan modal berdasarkan pemenuhan kewajiban kinerja fasilitas kesehatan di tingkat pertama oleh Bendahara dana modal JKN.

Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan dana, pendekatan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola insentif memiliki konsekuensi strategis yang signifikan. Puskesmas memastikan penggunaan uang muka sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan memastikan uang muka ditransfer langsung ke rekening Puskesmas dan obat-obatan tidak dibiayai dari sumber selain JKN. Meskipun ada keuntungan yang jelas dari pendekatan ini, masih ada masalah yang harus diatasi, seperti bagaimana mengelola dan memantau penggunaan insentif dengan benar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas manajemen dan pengawasan internal di tingkat Puskesmas serta kerja sama yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, termasuk otoritas audit dan pengawasan.

### **Monitoring Dan Evaluasi Dana Kapitasi**

Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah proses penting dalam pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas, bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan penggunaan dana tersebut. Untuk mengurangi masalah yang terkait, Puskesmas harus melakukan pembinaan intensif mulai dari perencanaan, pengawasan penggunaan dana kapitasi, hingga pelaporan keuangan, terutama



dengan pendampingan perencanaan, agar dana kapitasi JKN dapat digunakan secara optimal (Sabillah, 2022).

Manajemen, proses pengawasan dan evaluasi sangat memengaruhi keberlangsungan dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Puskesmas Desa Tanjung Anom melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap penggunaan dana kapitasi sekali dalam setahun melalui pihak internal puskesmas untuk mengetahui pemanfaatan dana, menilai efektivitas program dan kegiatan yang didanai, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut. Meskipun pengawasan dan penilaian dalam pengelolaan insentif diakui penting, masih ada banyak masalah yang perlu ditangani. Tantangan tersebut termasuk sumber daya manusia yang lebih baik, pengembangan sistem informasi yang lebih canggih, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi dampak nyata dari penggunaan insentif terhadap kesehatan masyarakat.

#### Kendala Hambatan

##### 1) Identifikasi Potensi Tantangan di Masa Depan

Meskipun tidak ada hambatan yang jelas saat ini, penting untuk tetap waspada terhadap perubahan kebijakan, fluktuasi anggaran, dan perubahan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang mungkin muncul. Pemimpin puskesmas dapat meningkatkan pemantauan dan pengawasan sambil tetap memperhatikan tren dan perubahan kebijakan kesehatan.

##### 2) Meningkatkan Kapasitas SDM

Memperkuat kemampuan petugas puskesmas dalam pengelolaan keuangan, manajemen risiko, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal akan membantu mereka mengatasi kesulitan dan hambatan di masa depan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan secara rutin dapat membantu karyawan menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami perencanaan dan komitmen yang rendah dapat menghambat kemampuan SDM, oleh karena itu dukungan pembinaan di Dinas Kesehatan sangatlah penting.

##### 3) Meningkatkan Transparansi dan Komunikasi

Komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk masyarakat yang dilayani, akan membantu menemukan hambatan potensial lebih awal dan mengatasinya dengan lebih efektif. Membangun hubungan dengan lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat juga akan membantu mengatasi masalah yang muncul.

##### 4) Evaluasi dan Pelaporan Rutin

Untuk mengatasi hambatan dengan lebih baik, menjadi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal, termasuk perubahan kebijakan atau regulasi, dapat membantu. Kepala Puskesmas dapat memastikan bahwa sistem dan prosedur yang ada dirancang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan memungkinkan Puskesmas beradaptasi dengan cepat. Dengan mengambil tindakan ini, Puskesmas Tanjung Anom dapat terus mengelola dana kapitasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun tantangan saat ini mungkin kecil, tindakan ini akan membuat Puskesmas lebih siap dan terampil untuk menghadapi masalah di masa depan.

## **KESIMPULAN**

1. Pengelolaan dana kapitasi Puskesmas Tanjung Anom telah optimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Puskesmas dapat memaksimalkan manfaat dari dana kapitasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Melalui proses pencarian, pelaporan, dan perencanaan yang cermat, Puskesmas dapat memastikan bahwa dana kapitasi digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
3. Monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana kapitasi Puskesmas sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan memahami karakteristik dan proses Monev yang tepat, Puskesmas dapat meningkatkan penggunaan dana kapitasi secara efisien dan mengoptimalkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat yang dilayani. Ini akan membantu mencapai tujuan kesehatan nasional dan memperkuat sistem kesehatan utama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambulan Panjaitan, A. (2020). Analisis Pemanfaatan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Indonesia: a Literature Review. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 1(1), 44–50.
- Anggraini, H. (2023). Prosedur Penyaluran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di UPT Puskesmas Sungai Lebung Pemulutan Selatan (OI).
- Dedy, P., & Hardy, K. (2021). Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi di UPTD Puskesmas Kabupaten Klungkung (Vol.4).
- Fikri, I., Putri, R. N., & Ernia, R. (2022). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Pegawai Di Puskesmas. *Journals of Ners Community*, 13(6), 623-541.
- Fitria Handayani, N. (2019). Pengendalian Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Pasrujambe Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2019.
- Harbing, H. H. (2018). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Study Pada Puskesmas Parigi Kabupaten Parigi Moutong). *Katalogis*, 6(3), 117-127.
- Hardy, P. D. K. (2021). Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Di UPTD Puskesmas Kabupaten Klungkung. In *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)* (Vol. 4).
- Hasan, A. G., & Adisasmito, W. B. (2017). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(3), 127-137

- Kurniawan, M. F., Siswoyo, B. E., Mansyur, F., Aisyah, W., Revelino, D., & Gadistina, W. (2016). Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi (monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia). *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 5(3), 122-131.
- Nasution, N. M., Lestari, R., Saphira, S. J., & Gurning, F. P. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7953-7960.
- Naufal Hidayat, H. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi Jkn Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- Rahmawati, B., Gobel, L. Van, & Rukiyah, N. (2023). Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pinogu. 3, 8187–8193.
- Sabillah, E. F. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas.
- Sari, F. I., Suroso, I., & Nurhayati, N. (2017). Strategi optimalisasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional puskesmas di kabupaten bondowoso. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(2), 224-236.
- Sholihin, M. I., Sakka, A., & Paridah, P. (2016). Pengelolaan Dana Kapitasi Bpjs Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Haluoleo University).
- Undap, I. C., Kalangi, L., & Manossoh, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" GOODWILL"*, 8(1).